



20 SKPD Pemkot Sudah Pakai Sistem Non-Tunai

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi transaksi nontunai (TNT) di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang telah berjalan sejak tahun 2017. Hal itu sesuai Instruksi Walikota Nomor 3/1017 tentang Pelaksanaan TNT.

Masih ada beberapa catatan atas pelaksanaan TNT tersebut. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menjelaskan, percepatan pelaksanaan digitalisasi TNT melalui aplikasi CMS pada 2018 selesai.

"Progresnya saat ini ada 20 SKPD yang sudah menerapkan TNT dan

Kalau pajak kendaraan bermotor mestinya harus bisa nontunai. Buktinya kan sebenarnya bisa pakai bukti pembayaran ATM dan bisa dilacak kapan dibayar, siapa yang bayar, berapa besar

mendatang akan bertambah 9 SKPD lain," ujarnya, dalam pemaparan Workshop Evaluasi Pelaksanaan TNT, di Ruang Bima Kompleks Balaikota Yogyakarta, Rabu (10/10).

la menambahkan, bahwa pada 2019 mendatang semua transaksi akan dilakukan secara nontunai. Upaya yang ditem-

● ke halaman 19

20 SKPD

● Sambungan Hal 13

puh adalah dengan mendorong SKPD penghasil secara bertahap melaksanakan penerimaan nontunai. "Itu digunakan untuk menyusun SOP penerimaan nontunai yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Kepala SKPD," ungkapnya.

Namun, Kadri menjelaskan, untuk mewujudkan TNT selama ini masih mendapati beberapa kendala di lapangan. Misalkan, masyarakat terbiasa melakukan pembayaran secara tunai, proses TNT yang lama sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat, proses TNT manual memertukan waktu dan SDM untuk antri di teller bank, dan sebagainya.

"Tidak semua pembayaran kegiatan juga bisa dengan TNT. Misalkan kegiatan di Satpol PP berupa honorarium dan tim operasi lapangan. Dinas UMKM Nakertrans tentang honorarium panitia pameran di luar kota," bebernya.

Pengecualian

Kadri menuturkan, beberapa pembayaran yang bisa dikecualikan dari TNT di antaranya adalah santunan kematian, bantuan musibah kebakaran, uang saku calon transmigran, dan pengadaan dalam masa tanggap darurat bencana.

"Kalau pajak kendaraan bermotor mestinya harus bisa nontunai. Buktinya kan sebenarnya bisa pakai bukti pembayaran ATM dan bisa dilacak kapan dibayar, siapa yang bayar, berapa besar," bebernya.

la pun berharap, tahun 2019 nanti dengan berjalannya TNT untuk semua hal, akan membuat efisiensi dan efektivitas meningkat, akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, penyerapan meningkat, meminimalisir idle cash, output, dan outcome kegiatan segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan masyarakat perlu disadarkan terkait TNT. Mereka mulai perlu dibiasakan ketika berhubung-

an dengan Pemkot, maka perlu menyiapkan rekening bank tertentu:

"Ini perjuangan tersendiri untuk mengajak warga membuka rekening untuk mendukung TNT," ucapnya.

la pun meminta agar SKPD juga memperbaiki sistem pembayaran yang dilakukan kepada masyarakat. Hal tersebut penting agar tidak mengganggu upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan ke Kota Yogyakarta.

Misalkan 800 pelaku UKM yang telah mengikuti pelatihan. Mereka juga sudah mampu memberikan supply makan minum untuk keperluan Pemkot Yogyakarta melalui program Gandeng Gandeng.

"Kalau kita tidak segera mentransfer uangnya, maka bukannya untung, mereka jadi kehilangan modal. Seharusnya itu jadi hak mereka karena mereka sudah menyampaikan makanan itu. Kita harus memperbaiki ini. Kalau begini, yang ada menjadikan mereka kehabisan modal," bebernya. (kur)

k Lanjut
Ditanggapi
Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005